

MENELUSURI AKAR RADIKALISME

Umar Basalim*

Abstract

Radicalism has basically been associated with those whose school of thought and its subsequent ideological programs are oriented towards drastic and violent change socially and politically. It also is considered identical with extremism (leftists as well as rightists); in contemporary Indonesia, the word has also been linked to terrorism. While its emergence is widely known as by product of complex factors including vast poverty and deprivation among varied segments of the society in many developing countries, state governments often fail to tackle the problem because of weak position of a given state and because repressive method has not been successful. This situation also applies to Indonesia's approach to struggling radicalism. The paper is an attempt to explore the roots of radicalism in Indonesia. Result of the study presents contemporary emergence of radical political ideology among leftists political groups that may make use of activism of labor unions and radical elements of separatism in some regions; further the writer refreshes the key factor contributing to radicalism, i.e., deprivation and poverty and recommend stronger state to achieve the goals of the politics of welfare

Key words: radicalism, deprivation and poverty, the politics of welfare, threats of ideological separatism

I. PENDAHULUAN

Beberapa negara berkembang memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan bersenjata atau revolusi seperti yang dialami oleh Indonesia. Perjuangan kemerdekaan seperti itu selalu didukung oleh semua komponen bangsa dari berbagai aliran politik, ideologi, etnik ataupun agama. Ketika kemerdekaan tercapai tidak semua komponen bangsa tadi terwadahi dalam struktur pemerintahan yang baru. Supra struktur politik dikuasai oleh sekelompok elit yang memang sudah siap, atau menganggap dirinya paling mampu menjalankan pemerintahan. Kelompok-kelompok yang merasa berjasa dalam perjuangan kemerdekaan tetapi tersingkir atau disingkirkan dari struktur politik baru itu tentu

* Staf Pengajar Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional

merasa tidak puas. Ketidakpuasan ini sering dilampiaskan dengan gerakan-gerakan radikal sampai pada pemberontakan bersenjata. Dalam kasus Indonesia itu bisa dilihat pada pemberontakan DI-TII Karto Suwiryono.

Persoalan yang dihadapi negara-negara sedang berkembang, utamanya di Indonesia, bukan hanya masalah politik yang biasanya juga terkait dengan ideologi (pemberontakan PKI di Madiun dan G30S PKI), tapi juga bahkan utamanya masalah ekonomi (gerakan anti etnis Cina) dan masalah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PRRI-PERMESTA, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan atau RMS dan Gerakan Papua Merdeka atau GPM). Sampai hari ini kita di Indonesia masih menghadapi masalah radikalisme, sebagian masih terkait dengan radikalisme yang timbul pada awal kemerdekaan, sebagian lagi terkait dengan masalah baru baik politik, ideologi, etnik, agama, maupun masalah hubungan Pusat - Daerah.

Radikalisme tidak hanya mendera negara-negara sedang berkembang tetapi juga dialami oleh negara-negara maju yang justru menganut sistem demokrasi. Hal seperti memang mengherankan. Tapi Michael Mann menjelaskan dengan sangat masuk akal. "*We, The People*" secara tidak langsung menghadapkan kami dan bukan kami atau orang luar. Negara Nasional dengan nasionalismenya yang harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh rakyatnya tentu dihadapkan dengan Negara Nasional lain, apalagi kalau Negara Nasional itu mono etnik. Kondisi seperti itu juga bisa memicu tindakan-tindakan radikal baik oleh negara maupun kelompok (Michael Mann, 2005: 55).

II. POKOK PERMASALAHAN

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahannya adalah mengapa negara-negara sedang berkembang sering menghadapi masalah radikalisme. Apa penyebab timbulnya radikalisme itu. Dan bagaimana solusi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal itu semua.

III. LANDASAN KONSEP

Secara umum radikalisme dimengerti sebagai aliran pemikiran yang menghendaki perubahan atau pembaruan politik dan sosial dengan cara drastis atau dengan cara kekerasan. Radikalisme juga sering diidentikkan dengan ekstrimisme, baik ekstrim kiri maupun kanan dan bahkan belakangan kosa kata itu seperti terkait dengan terorisme.

Seperti dikemukakan di atas radikalisme bisa berbasis ideologi, politik, etnik, agama, ekonomi, atau yang di Indonesia terangkum dalam akronim SARA. Karena di negara-negara sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki

ideologi asli setempat (*indigenous ideology*), maka ideologi yang dianut secara umum disebut sebagai ideologi impor (*imported ideology*). Di bawah ini dikemukakan beberapa konsep atau aliran pemikiran radikalisme.

1. Separatisme

Separatisme merupakan gerakan politik untuk memperoleh kedaulatan dengan memisahkan diri dari wilayah induk. Kaum separatis biasanya lebih memilih istilah “determinasi diri” untuk menimbulkan kesan lebih lunak.

Meskipun pada dasarnya separatisme merupakan gerakan radikal, tapi dikenal juga gerakan separatis politik damai. Separatisme damai terdapat pada kasus separatisme Quebec di Kanada yang sudah berjalan selama 30 tahun sampai hari ini. Separatisme damai juga dialami oleh Cekoslowakia ketika memisahkan diri dari Uni Sovyet. Hal yang sama dialami Singapura ketika memisahkan diri dari Malaysia. (Horowitz, Vol. 23, No. 2 April 1981). (http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Horowitz_patterns_of_ethnic_separatism.pdf).

Di negara-negara sedang berkembang separatisme umumnya dilakukan dengan kekerasan bersenjata atau pemberontakan. Dalam kasus Indonesia, hal itu dapat dilihat pada pemberontakan PRRI-PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, Gerakan Papua Merdeka (GPM) di Papua. Gerakan separatisme yang berlandaskan masalah etnis dapat dicermati di Sri Lanka. Mengacu kepada Furnivall, Sri Lanka adalah sebuah negara plural yang terdiri atas berbagai bahasa, agama dengan keragaman pengalaman sejarah masing-masing yang puluhan tahun hidup dalam solidaritas etnis cukup tinggi. Terhitung sejak tahun-tahun 1950-an ketegangan politik antara mayoritas Sinhalese dan komunitas Tamil Sri Lanka sebagai minoritas semakin meningkat hingga hari ini. Puncak ketegangan tersebut ditandai dengan munculnya ide pemisahan *Tamil State* secara mandiri. Ketegangan antara kelompok gerilyawan Macan Tamil (*Liberation Tigers of Tamil Eelam* atau LTTE) merupakan contoh buruk yang ditampilkan negara berlandaskan demokrasi seperti Sri Lanka dalam mengelola sistem politik demokratik terutama karena pokok masalah ketegangan tersebut adalah pengkotak-kotakan etnis (Kearney, Vol. 25, Sept 1985). <http://www.jstor.org/discover/10.2307/2644418?uid=369324751&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=3&uid=60&sid=21102543096127>

2. Marxisme

Seperti halnya kebangkitan liberalisme atau kapitalisme, Marxisme juga bangkit sebagai suatu respons terhadap era industrialisasi. Bedanya ketika para ekonom klasik penganut liberalisme-kapitalisme mempromosikan sistem ekonomi

pasar, Marxisme justru melancarkan kritik keras terhadap sistem ekonomi kapitalisme dengan mekanisme pasarnya. Marx, pendiri isme itu, memang sangat gencar menyerang model ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith. Marx dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu berusaha membuktikan bahwa sistem kapitalisme adalah tidak adil dan akan busuk dari dalam. Marx melihat bahwa kapitalisme adalah alat kaum kapitalis atau pemilik modal untuk melipatgandakan kapitalnya dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan itu dilakukan dengan mengeksploitasi atau menekan kaum buruh. Tetapi kaum buruh tidak akan diam dan melakukan revolusi melawan ketidakadilan itu. Karena basis pengembangan kapitalisme adalah kepemilikan individu, maka kepemilikan individu itulah yang harus dibongkar dan diganti dengan kepemilikan komunal (Deliarnov, 2006: 41).

Untuk tujuan itu Marx bersama Engel merumuskan ideologinya yang termuat dalam buku *Manifesto Komunis*. Guna mencapai tujuan menghancurkan kapitalisme itu Marx menganjurkan kaum buruh untuk memelopori revolusi proletariat dengan tujuan agar negara dikuasai oleh kaum proletar, pemerintahan dengan model pemerintahan komunisme. Pemerintah harus kuat dan karenanya pemerintahan model ini disebut pemerintahan diktator proletariat. Mereka sendiri menyebut sistem pemerintahannya sebagai Republik Rakyat atau Republik Rakyat Demokratik. Mereka sebut demokrasi karena demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan kaum proletar adalah mayoritas di hampir semua negara. Fahaman Komunisme-Marxisme ini menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

3. Naziisme

Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman atau (Neosozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDP) atau Partai Nazi adalah sebuah partai politik Jerman yang didirikan pada tahun 1920. NSDP ini merupakan kelanjutan dari partai buruh yang sudah berdiri sebelumnya. NSDP merupakan kekuatan politik utama di Jerman sejak 1933 sampai akhir perang dunia kedua tahun 1945. Partai ini dipimpin oleh Hitler yang kemudian dipilih menjadi Kanselir pada tahun 1933. Partai Nazi ini telah melahirkan ideologi baru yang dikenal dengan nama Naziisme. Naziisme menekankan pada kemurnian ras Jerman yaitu Ras Aria dengan jalan menyingkirkan ras lain seperti orang Yahudi, orang Slavia, orang Rom dan Kaum Komunis. Pemurnian ras ini dilakukan secara radikal. Selama periode itu Nazi telah membunuh 6 juta orang Yahudi yang dikenal dengan Holocaust.

Meskipun dasar awalnya adalah pemurnian ras, tapi Naziisme sering dikelompokkan sebagai ideologi ultranasionalis atau ekstrim kanan yang sangat

membenci Yahudi dan Kaum Komunis. Sampai sekarang orang atau kelompok (terutama di Eropa) yang beraliran ekstrim kanan sering dijuluki sebagai Neo Nazi. Meskipun ideologi naziisme tidak menyebar ke negara-negara sedang berkembang, tapi konsep kemurnian ras dan ultra nasionalismenya memberi inspirasi ke beberapa kelompok di negara-negara sedang berkembang sebagai dasar gerakan radikal.

4. Zionisme

Zionisme berasal dari kata Ibrani “zion” yang artinya batu-karang. Maksudnya merujuk kepada batu bangunan Haykal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah bukit karang bernama “Zion”, terletak di sebelah barat-daya Al-Quds (Jerusalem). Zionisme adalah gerakan politik kaum Yahudi untuk kembali ke Zion, bukit dimana Yerusalem berdiri. Gerakan yang muncul pada abad ke 19 ini ingin mendirikan negara Yahudi di Afrika, tapi kemudian berubah menjadi di Tanah Palestina yang pada saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman (Khalifah Usman) Turki. Zionisme kini tidak lagi hanya memiliki makna keagamaan, tetapi telah beralih kepada makna politik, yaitu “suatu gerakan pulangnya diaspora (terbuangnya) kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah-air bangsa Yahudi, dengan Jerusalem sebagai ibukota negaranya”. Istilah Zionisme dalam makna politik itu dicetuskan oleh Nathan Bernbaum, dan Zionisme Internasional yang pertama berdiri di NewYork pada tanggal 1 Mei 1776, dua bulan sebelum kemerdekaan Amerika-Serikat dideklarasikan di Philadelphia (Maulani, Z.A, 2002).

Zionisme merupakan gerakan politik internasional yang ditandai dengan berdirinya negara Israel pada 15 Mei 1948 maka jelaslah bahwa tujuan Zionisme adalah pendirian negara ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah mengeluarkan Resolusi PBB No. 3379 pada tanggal 10 Desember 1975 yang menyamakan Zionisme dengan diskriminasi rasial. Tapi resolusi itu kemudian dicabut pada tanggal 16 Desember 1991. Gerakan untuk kembali ke tanah Palestina ini dilakukan dengan radikal dan masih berlangsung sampai hari ini. Zionisme inilah yang terutama memicu gerakan-gerakan radikal baik di Timur Tengah maupun dunia Islam pada umumnya.

Dalam tulisannya yang diterbitkan oleh penerbit Daarus Saudiyyah Jedah tahun 1984 (terjemahan Indonesia tahun 1988) dengan judul “*Bahaya Zionisme Terhadap Dunia Islam*”, Dr. Majid Kailani menyebutkan bahwa gerakan Zionis berada di belakang semua peristiwa yang bertujuan menghancurkan Islam. Ia mengemukakan bahwa Talmud, buku suci mereka menyatakan “ Bangsa Yahudi berasal dari unsur Tuhan dan bangsa lainnya dari unsur hewan. Jika terjadi

perselisihan antara Tuhan dan Hakhom (pemuka agama Yahudi) maka kebenaran ada dipihak Hakhom. Bangsa Yahudi dibenarkan menipu, menganiaya dan membunuh bangsa lainnya”. (Ini mirip konsep Nazi dengan kemurnian ras Arianya). Sepanjang buku itu Majid Kailani mengemukakan konspirasi Yahudi dengan Amerika Serikat untuk menghancurkan dunia Islam. Ia Mengutip ucapan Gamal Abdul Nasser pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa Israel adalah Amerika dan Amerika adalah Israel. Oleh karena itu AS sampai kapanpun akan membela Israel. Oleh karena itu gerakan-gerakan radikal Islam selalu anti Amerika.

Radikalisme negara yang dilakukan Israel untuk menggusur, menyingkirkan atau membunuh rakyat Palestina terus berlangsung sampai saat ini. Kenyataan ini sering memberikan inspirasi kepada berbagai kelompok di dunia bahwa radikalisme ditakuti dan untuk menang orang harus bersikap dan bertindak radikal.

5. Radikalisme Islam

“Niet de al-Qur”an en de overlevering, maar de wetboeken en dogmatische werken, sedert de derdeeuw onstaan, does ons dien Islam kennen”. Ini adalah ucapan Prof. Snouck Hurgronje yang dikutip oleh Prof.Dr.M.Rasjidi dari *Verspreide Geschriften*, deel IV/I pag 9 dalam kata pengantar buku Harun Nasution yang berjudul *Teologi Islam*. Kutipan itu berarti “Bukannya al-Qur’an dan Hadis yang memberikan pengertian Islam kepada kita, akan tetapi kita-kitab hukum dan teologi yang telah ada sejak abad III H (9 AD)”. Snouck menyatakan bahwa ajaran dalam kitab-kitab itu memberi pedoman yang sangat berguna untuk menyelidiki alam fikiran bangsa-bangsa yang menganut agama Islam serta hidup dalam isolasi dari perkembangan masyarakat dunia sejak abad 17.

Memang kitab-kitab produk abad ke III hijriah sebagian sudah out of date. Tapi itulah yang memang diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia (Sekarang dikenal dengan sebutan kitab kuning). Kitab-kitab lama itu sebenarnya hampir tidak ada yang mengandung teologi yang radikal, malah cenderung toleran. Dan inilah yang digunakan Snouck untuk menundukkan kaum santri atau Islam tradisional. (Namun demikian model teologi seperti itu juga dapat dipakai untuk melegitimasi gerakan radikal di masa lampau. Pemberontakan Diponegoro misalnya, meskipun dipicu oleh masalah tanah, mendapatkan penguatan dari teologi Islam model itu. “Pembalasan” secara radikal terhadap pemberontakan G30S PKI oleh kaum santri di Jawa Timur juga dilandasi oleh teologi tradisional itu; penulis).

Tentu ini bertolak belakang dengan kaidah “Jika umat Islam ingin maju dan mendapat tempat yang wajar dalam masyarakat dunia, haruslah mengetahui Islam dari sumbernya yakni al-Qur’an dan Hadis”. Kaidah ini mengundang berbagai penafsiran baru yang cenderung tekstual dan kebanyakan bersifat radikal, seperti Wahabi dan Salafi Militan.

M.Rasyidi menyatakan konteks keadaan sosial, politik dan filsafat banyak pengaruhnya terhadap perkembangan teologi Islam. Tanpa mengetahui hal-hal tersebut pengetahuan kita tentang teologi Islam terasa kurang punya dasar yang kokoh. Sementara Harun Nasution sendiri dalam bukunya itu menyatakan bahwa berdasarkan sejarah timbulnya aliran-aliran teologi Islam (seperti Kaum Khawarij, Kaum Murji’ah, Kaum Mu’Tazilah dan Syiah) awalnya dipicu oleh perselisihan politik atau perebutan pengaruh dan kekuasaan (Harun Nasution, 1972 : 11- 61). Oleh karena itu dapat dimengerti konstataasi sementara kalangan bahwa gerakan Salafi-Wahabi yang anti demokrasi disokong oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk menepis pengaruh “Arab Spring”.

Banyak konsep yang bisa menerangkan tentang terjadinya radikalisme di kalangan umat Islam baik di Timur Tengah dan Mesir maupun Indonesia. Dalam kaitan ini munculnya radikalisme terkait erat dengan tumbuhnya suasana terdeprivasi atau teralienasi umat Islam. Dalam pandangan Robert Gurr, munculnya kesenjangan yang melebar antara realitas yang terjadi dengan harapan-harapan yang tidak terpenuhi akan melahirkan rasa terdeprivasi (*sence of depravation*) pada sekelompok besar individu, baik menyangkut soal pendapatan, kesejahteraan, status sosial, maupun kebebasan politik. Tesis Gurr adalah semakin kuat perasaan kesenjangan atau deprivasi relatif individu atau kelompok, yang ditandai dengan keterasingan dan frustasi yang mendalam atas kondisi yang sedang berlangsung, maka kecenderungan untuk berpartisipasi dalam aksi politik kekerasan semakin tinggi pula (Ted Robert Gurr, 1970: 24-29).

Seperti disinggung di atas, gerakan radikal Islam di Timur Tengah, terutama merupakan gerakan perlawanan terhadap Zionisme, anti Israel dan Anti Amerika. Menurut M.Zaki Mubarak problem menguatnya radikalisme Islam disebabkan oleh banyak segi, baik yang berkaitan dengan doktrin keagamaan, krisis psikologis, dinamika lokal, maupun masalah- masalah pertikaian di tingkat global (M. Zaki Mubarak, 2008 : ix).

IV. ANALISIS

1. Gerakan Separatisme

Separatisme sebagai gerakan radikal dalam bentuk pemberontakan sering muncul pada awal kemerdekaan negara-negara sedang berkembang. Bila tidak

terselesaikan cepat imbasnya akan berlangsung lama. Di Indonesia gerakan separatisme antara lain dilakukan oleh Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, PRRI- PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Gerakan Papua Merdeka (GPM). Pemicu utama pemberontakan adalah ketidakpuasan daerah-daerah terhadap pusat baik menyangkut masalah politik maupun ekonomi. Ini juga menunjukkan macetnya komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berikut rakyatnya.

Hampir semua pemberontakan diatasi dengan aksi militer. Penyelesaian RMS mendapat sedikit “jasa baik” Pemerintah Belanda yang bersedia menampung pimpinan dan sebagian pengikut ke RMS di Negeri Belanda. Setelah era reformasi, dengan memanfaatkan kebebasan politik, aspirasi RMS secara sporadis muncul lagi di Maluku.

Sedangkan PRRI-PERMESTA yang dipelopori oleh sejumlah perwira menengah (Simbolon cs.) ditumpas habis dengan aksi militer oleh Pemerintahan Sukarno. GAM pimpinan Teuku Muhammad Hasan Di Tiro atau Hasan Tiro muncul setelah penyelesaian pemberontakan Daud Beureueh (yang berbasis agama) melalui pemberian status Daerah Istimewa kepada Aceh tidak memuaskan rakyat Aceh.

Berbeda dengan Daud Beureueh yang menuntut pemberlakuan syariat Islam di Aceh, GAM bertujuan untuk memisahkan diri dari RI dan membentuk pemerintahan sendiri untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam kaitan dengan GAM ini Michael Mann dalam *The Dark Side of Democracy-nya* menyatakan bahwa Aceh rawan terhadap kekerasan etnik dan separatisme karena rakyat Aceh memegang kuat nilai dan tradisi lama yang menganggap Aceh sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Indonesia dianggap sebagai penjajah Jawa yang menggantikan penjajah Belanda (Michael Mann, 2005). Gerakan ini dicoba diselesaikan dengan aksi militer yang terkenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM). DOM telah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat. Selain jumlah korban meninggal yang begitu banyak, juga menyebabkan proses pembangunan di Aceh terlantar. DOM yang banyak mendapatkan kritik dari dunia internasional baru berakhir pada Agustus 1998. Akhirnya pada akhir bulan Mei 2005 tercapailah perdamaian antara GAM dengan Pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Pemerintah Swedia. Terbentuklah Nangro Aceh Darusalam (NAD) dengan Otonomi Khusus seperti sekarang ini.

Sedangkan penyelesaian Gerakan Papua Merdeka, yang tampaknya mendapat dukungan unsur-unsur luar negeri, sampai sekarang belum di selesaikan dengan aksi militer, hanya ditangani oleh kepolisian dengan Brimobnya.

Pemberian otonomi khusus kepada Papua masih menyisakan kekecewaan sejumlah pemuka suku dan GPM-nya, dan dengan alasan itu mereka terus bergerilya di pedalaman dan hutan.

2. Radikalisme Berdasar Ideologi/Politik

Seperti telah disinggung di muka, basis ideologi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah ideologi yang berasal dari impor. Marxisme masuk ke Indonesia melalui tokoh kiri dari Belanda yang bernama Sneevliet yang masuk ke Indonesia pada 1913. Pada tahun 1914 ia membentuk organisasi politik dengan nama Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) yang awalnya hanya beranggotakan orang Belanda dan Belanda keturunan (Indo-Belanda). ISDV berkembang sangat cepat dan berhasil menggaet sejumlah tokoh pergerakan Indonesia seperti Semaun, Alimin dan Darsono yang semula menjadi anggota Serikat Islam (SI). Sejarah Indonesia mencatat bahwa peristiwa ini menyebabkan perpecahan di kalangan SI menjadi SI merah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia dan SI putih atau SI asli yang tetap dipimpin oleh H.O.S.Tjokroaminoto, H.Agus Salim dan Abdul Muis. Sedangkan SI merah dipimpin Semaun, Alimin serta Darsono dan kawan-kawan.

Sebagai ideologi yang radikal, Marxisme-Leninisme yang menjadi azas Partai Komunis Indonesia (PKI), membuat PKI menjadi partai paling militan dan radikal di kala itu. Pada tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan yang terkenal dengan pemberontakan Madiun. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh militer. Dan pada 1965 PKI kembali melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30S-PKI. Keberhasilan penumpasan G30S-PKI melahirkan rezim Orde Baru yang akhirnya menyatakan Marxisme-Komunisme sebagai ajaran atau ideologi terlarang.

Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini orang bisa mengakses ajaran apapun dari manapun. Radikalisme “kiri” tampaknya mulai menginspirasi sejumlah kelompok di Indonesia, termasuk gerakan buruh tertentu. Karena pada dasarnya radikalisme apapun bisa tumbuh subur pada kondisi kemiskinan kesenjangan dan ketidakadilan, maka akar masalah inilah yang seharusnya diatasi lebih dahulu.

3. Radikalisme Islam Lama

Meskipun pemberontakan Kartosuwiryo menggunakan simbol Islam, yaitu DI-TII, tetapi pemicu awalnya adalah masalah politik. Gerakannya bertujuan melawan hasil perjanjian Renville antara Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah RI dan Pasukan Divisi

Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat. Kartosuwiryo dengan pasukan Hisbullah, sabilillah memilih bertahan di Jawa Barat. Dengan berakhirnya perjanjian Renville pada tahun 1948, pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat lagi. Peristiwa ini menimbulkan konflik dengan Kartosuwiryo dan pengikutnya. Kemudian Panglima TII wilayah Sulawesi Kahar Mazakar bergabung dengan Karto Suwiryo. Pembangkangan ini berhasil ditumpas dengan aksi militer TNI.

Seperti sempat disinggung sekilas di atas, Daud Beureueh yang kecewa dengan Bung Karno karena tidak memenuhi janji untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh, melakukan pemberontakan. Akhirnya konflik ini diselesaikan dengan pemberian status otonom Daerah Istimewa kepada Aceh. Tapi solusi ini masih mengecewakan rakyat Aceh sehingga pemberontakan ditingkatkan dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka atau (GAM).

4. Radikalisme Islam Baru

Proses transisi demokrasi dalam era reformasi yang yang digulirkan sejak tahun 1998 dirasakan makin tidak menentu, membuat berbagai kalangan merasa frustrasi (termasuk kalangan yang prodemokrasi). Faktanya, reformasi demokrasi yang menawarkan pelbagai janji perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih adil, ternyata juga melahirkan sejumlah paradoks yang pelik. Kebebasan politik sebagai agenda reformasi selain memunculkan kebebasan pers, politik multi partai, pemilu yang demokratis dan sebagainya juga membuka ruang bagi kelompok-kelompok keagamaan radikal dengan pelbagai macam agendanya. Kemacetan reformasi akibat krisis dan pertengkar elit yang tidak jelas ujung pangkalnya, secara tidak langsung telah menyuburkan-gerakan Islam radikal yang seolah menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi keadaan yang carut-marut ini. Lahirlah Front Pembela Islam dengan segala tindakan radikalnya dengan semboyan memberantas kemasiatan. Laskar Jihad, di tangan impotensi Pemerintah dalam mengatasi masalah Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), terus menggelar latihan perang dan mobilisasi ribuan relawan untuk berjihad di Ambon dan Poso. Para mantan aktivis Negara Islam Indonesia (NII) dan usroh juga telah mendeklarasikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam konggres di Yogya pada tahun 2000 dengan mengusung agenda pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Pada saat bersamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara intensif menggelar kampanye dengan mengerahkan ribuan anggotanya menawarkan konsep Khilafah Islamiyah sebagai pengganti sistem demokrasi (M.Zaki Mubarak, 2008 : 7-8).

Gerakan Islam radikal yang betul-betul berbasis teologi radikal (Wahabi-Salafi Militan) adalah yang dianut oleh gerakan Ihwanul Muslimin di Mesir dan di Indonesia serta Malaysia oleh Jamaah Islamiyah yang kemudian di Indonesia menjelma menjadi gerakan teror. Sebenarnya munculnya gerakan-gerakan radikal Islam di era Reformasi disebabkan kelemahan atau kelengahan atau bahkan ketidakmampuan Pemerintah dalam merespon isu-isu sensitif di kalangan Islam. Gerakan Salafi Militan (GSM) dapat disikapi dengan beberapa siasat. Menurut M. Syafii Anwar, pertama-tama harus disadari bersama bahwa mereka berhak untuk hidup dan berkembang di Indonesia sebagaimana kelompok-kelompok keagamaan lainnya. Bagaimanapun kemunculan mereka tidak bisa dipisahkan dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia setelah jatuhnya rezim Soeharto dan ketidakjelasan arah reformasi selanjutnya. Secara sosiologis, kemunculan dan perkembangan GSM adalah implikasi dari keberadaan negara yang lemah. Serba ketidakpastian, lemahnya implementasi hukum, dan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Suasana ini adalah kondusif bagi munculnya inspirasi berbagai kelompok untuk membuat “gerakan alternatif” dengan menggunakan simbol-simbol agama dan penegasan diri (*self assertive*). Ideologisasi syariah dianggap sebagai jalan keluar dari krisis sosial khususnya dan krisis multidimensi secara general. Selanjutnya ditegaskan oleh Anwar, bahwa masa depan gerakan ini akan dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mengantarkan bangsa Indonesia mengatasi krisis multidimensional hingga saat ini masih berlangsung terus menerus. Apabila Presiden dan jajaran pimpinan negara lainnya gagal bekerjasama dalam mengelola strategi dalam melalui krisis tersebut dan Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera tidak berhasil diwujudkan, maka GSM dan gerakan-gerakan tipikal lainnya akan berkembang sebagai konsekuensinya. Lebih jauh lagi, tuntutan kepada pelaksanaan syari’ah akan terus disuarakan. Sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial, ketidakmenentuan politik, masyarakat tanpa hukum adalah rentan dan menjadi momentum bagi kemunculan eksklusivisme, fanatisme, dan militansi agama (Anwar, M.Syafi’i, 2002).

Konsep deradikalisasi sebagai solusi yang dilakukan oleh Pemerintah tampaknya belum menemukan pola yang tepat sehingga belum membuahkan hasil yang berarti. Hal ini disebabkan masih kuatnya model penyelesaian represif, padahal cara seperti itu tidak menyelesaikan masalah, hanya berfungsi jangka pendek sekedar sebagai pemadam kebakaran.

5. Radikalisme Berbasis Etnik

Konflik di Bosnia Herzegovina yang berlangsung dalam kurun waktu April 1992-1995, merupakan sebuah bentuk pembersihan etnik yang paling pahit pasca Perang Dunia II di Eropa, yang melibatkan negara-negara seperti Bosnia, Serbia, dan Yugoslavia. Sekitar 8000 Muslim di Bosnia terbunuh pada pembersihan etnis tersebut, dimana tentara Serbia bertanggung jawab atas pemusnahan masal ini, walaupun pihak Serbia menganggap hal ini adalah perang saudara di wilayah Balkan. Nyatanya pengadilan internasional menetapkan Radovan Karadzic dan Ratko Mladic sebagai penanggung jawab pada *ethnic cleansing* tersebut (Mann, Michael, 2005).

Seharusnya, mekanisme demokrasi yang sehat dapat menghindarkan terjadinya tindak kekerasan, karena demokrasi yang sehat menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Namun kita di Indonesia yang baru berdemokrasi sekitar lima belas tahun ini, dan demokrasi masih berada pada tataran demokrasi prosedural, mekanisme penyelesaian konflik masih selalu menghadirkan kekerasan.

Dalam *The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*, Michael Mann secara khusus menyoroiti radikalisme dalam bentuk kekerasan etnik di Indonesia yang memang merupakan negara multi etnik. Dalam kaitan dengan radikalisme anti etnik Cina, Mann menyatakan bahwa Indonesia tidak mampu melakukan kontrol terhadap kapitalisme dimana etnik Cina yang hanya berjumlah sekitar 4% dan tidak memiliki kedaulatan politik (pada masa Orba tentunya, karena saat ini mereka memiliki kedaulatan politik yang sangat berarti), menguasai 70% aktivitas perekonomian (Mann, Michael, 2005 : 97).

Seringnya kekerasan yang dilakukan terhadap etnik Cina di masa lalu memang utamanya disebabkan karena kesenjangan ekonomi itu. Kesenjangan ekonomi itu masih terus berlangsung sampai sekarang, namun iklim kebebasan pada era reformasi tampaknya berhasil meredakan ketegangan etnik itu, meskipun harus terus diwaspadai karena akar masalahnya belum terselesaikan.

Di era reformasi ini kita juga masih mengalami kekerasan etnik seperti pengusiran dan bahkan pembunuhan terhadap etnik Madura oleh etnik Dayak di Kalimantan, pengusiran etnik Bugis dari Ambon dan berbagai ketegangan kecil antar etnik lainnya. Sumber utama radikalisme etnik tersebut di atas adalah masalah kesenjangan ekonomi antara “keberhasilan” etnik pendatang dengan penduduk asli. Selain itu kesibukan elit dalam dalam berebut kekuasaan politik baik di pusat maupun daerah, telah mengabaikan kewajiban Nation Building. Padahal solusi jangka panjangnya terletak pada Nation Building itu.

V. SIMPULAN

1. Konsep atau teori Robert Gurr seperti disinggung di atas sebenarnya dapat menjelaskan sebab umum dari timbulnya gerakan-gerakan radikal. Rasa terdeprivasi, teraliansi, atau tersisih baik secara sosial, politik maupun ekonomi dapat menyebabkan frustrasi yang mendalam. Biasanya kondisi yang banyak muncul di negara-negara yang sedang berkembang seperti ini tidak tertangani dengan baik karena hal ini menyangkut akar masalah yang memerlukan program jangka panjang untuk mengatasinya. Mahatir di Malaysia berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebar antara etnik Melayu dengan Cina. Program ekonomi yang bertujuan mengangkat peran etnik Melayu di bidang ekonomi agar setara dengan peran ekonomi etnik Cina ini berlangsung selama 20 tahun. Sementara di Indonesia kesenjangan seperti ini dibiarkan menganga. Apalagi di era reformasi dengan alasan kebebasan dan politik anti diskriminasi, kondisi kesenjangan itu terasa makin melebar.
2. Meskipun secara resmi ajaran atau ideologi Marxisme-Komunisme dinyatakan terlarang, tetapi dalam era keterbukaan informasi dan komunikasi seperti sekarang, ajaran atau ideologi apapun dapat diakses dengan mudah. Ditengarai adanya sementara gerakan buruh yang beraliran kiri mulai muncul dan melakukan aksi-aksi yang relatif radikal. Oleh karena itu penyelesaian akar masalah berupa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi harus selalu menjadi perhatian utama pemerintah yang dituangkan dalam program jangka panjang yang jelas, terukur dan terarah.
3. Radikalisme Islam yang semula dipicu oleh rasa terdeprivasi kemudian mencari pegangan teologi yang radikal yang sering disebut Salafi-Radikal yang menghalalkan tindak kekerasan terhadap orang “kafir”. Kafir di sini lebih sering diartikan sebagai Amerika atau Barat pada umumnya yang memang mendukung gerakan zionisme yang menista rakyat Palestina. Program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah belum menunjukkan hasil karena selain belum menyentuh akar masalah, juga karena Pemerintah masih lebih mengedepankan tindakan represif dan tidak jarang cara itu dilakukan dengan “over acting”.
4. Keberhasilan Pemerintah mengatasi separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara damai dengan terbentuknya NAD yang memperoleh otonomi khusus masih menyisakan sejumlah masalah baik terkait dengan pembagian hasil dari sumber-sumber ekonomi yang ada di Aceh maupun sisa sentimen anti pusat akibat DOM masa lalu.
Saat ini yang lebih rumit adalah masalah GPM di Papua karena disinyalir ada dukungan dari luar negeri. Berdirinya kantor GPM di London membenarkan

adanya sinyalemen itu. Sampai sekarang masalah Papua belum ditangani dengan operasi militer, tapi sekedar operasi keamanan dengan menggunakan satuan Brimob dari Kepolisian. Kesenjangan kultural antara Papua dan Pemerintah Pusat memperumit penanganan masalah Papua. Peningkatan program pendidikan untuk mencetak SDM lokal perlu diprioritaskan. Pelaksanaan otonomi khusus sangat memerlukan SDM lokal yang mumpuni (*capable*).

5. Keberadaan negara lemah (*weak state*) adalah ladang subur bagi tumbuhnya eksklusivitas dan militansi hingga ideologisasi. Inisiatif untuk memunculkan gerakan alternatif adalah eksekusi dari kekecewaan kelompok tertentu yang muncul di tengah-tengah ketidakpastian hukum hingga merosotnya implementasi hukum itu sendiri dan krisis ekonomi yang tidak terbaca akhirnya. Akhirnya, kualitas kepemimpinan dari Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara yang ditunggu sebagai peredam suara-suara bagi ideologisasi syaria'ah sebagai arus utama gerakan militan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Erlangga Jakarta 2006.
- Gurr, Ted Robert. *Why Men Rebel*, Princeton University Press 1970.
- Kailani, Dr.Majid. *Bahaya Zionisme Terhadap Dunia Islam*. Pustaka Mantiq, 1988
- Mann, Michael. *The Dark Side Of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press 2005.
- Maulani, Z.A. *Zionisme; Gerakan Menaklukan Dunia*. Penerbit Dasetta, 2002
- Mubarak, M.Zaki, *Genealogi Islam Radikal*, Pustaka LP3ES Jakarta 2002.
- Nasution Harun. *Teologi Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia 1972.
- Syamsudin, Nazaruddin. *Integrasi Politik*, Gramedia, 1989.